



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASAMAN**

PENGUMUMAN  
NOMOR: 86/PL.02.2-Pu/1308/2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN NOMOR: 70/PL.02.2-Pu/1308/2025  
TENTANG HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON WAKIL  
BUPATI SERTA PENERIMAAN MASUKAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT  
TERHADAP BAKAL CALON WAKIL BUPATI  
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2024  
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

Bahwa untuk melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PHPU.BUP-XXIII/2025 dan ketentuan Pasal 137 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, serta menindaklanjuti Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Nomor: B-83/PM02.2 /K.SB-06/03/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Saran Perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman mengumumkan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Bakal Calon Wakil Bupati serta Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan sebagai berikut:

| No | Nama Lengkap Calon                   | Status (Mantan Terpidana/Terpidana) | Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1  | Bakal Calon Wakil Bupati<br>PARULIAN | -                                   | Memenuhi Syarat                                 |

Masyarakat dapat memberikan masukan dan tanggapan atas Bakal Calon Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan melalui:

1. Portal Publikasi Pemilu dan Pemilihan pada laman: <https://infopemilu.kpu.go.id> dalam fitur "tanggapan" dengan cara:
  - a. memilih tahapan "Pencalonan Peserta Pemilihan Kepala Daerah";
  - b. memilih kategori "Tanggapan terhadap Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah";
  - c. memilih calon yang akan diberikan masukan dan tanggapan ;
  - d. mengisi data identitas pemberi masukan dan tanggapan masyarakat;
  - e. mengisi jenis masukan dan tanggapan berupa:
    - 1) dukungan atas calon dan/atau pasangan calon,
    - 2) masukan dan tanggapan masyarakat terkait: pasangan calon, status sebagai mantan terpidana dan terpidana termasuk jenis tindak pidananya, dan/atau hasil penelitian persyaratan administrasi calon/penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon.
  - f. menuliskan uraian;

- g. mengunggah dokumen yaitu: KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan;
- h. menekan "SUBMIT" .

2. Secara luring ke Kantor KPU Kabupaten Pasaman dengan alamat Jl. A Yani No 13 Nagari Pauah, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, penyampaian masukan dan tanggapan masyarakat secara luring dilakukan dengan cara:
- a. mengisi daftar hadir.
  - b. mengisi formulir Model TANGGAPAN. MASYARAKAT.KWK PSU-MK dapat diunduh pada tautan ([bit.ly/FormTanggapanPSU](http://bit.ly/FormTanggapanPSU))
  - c. menyerahkan formulir sebagaimana dimaksud huruf b kepada KPU Kabupaten Pasaman
  - d. menyerahkan fotokopi KTP-el dan/atau dokumen bukti penunjang yang relevan.

Dalam rangka mewujudkan keterbukaan informasi dan mendorong partisipasi masyarakat pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, KPU Kabupaten Pasaman mengumumkan visi, misi dan program Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman sebagaimana terlampir.

Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Bakal Calon Wakil Bupati Pasaman pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan diterima oleh KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 19 - 21 Maret 2025.

Demikian diumumkan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Lubuk Sikaping  
Pada tanggal 21 Maret 2025

Ketua  
Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pasaman



Taufiq



**NASKAH VISI MISI  
WELLY SUHERY,S.T.  
DAN  
PARULIAN**

**WeLi**

**#PASAMAN BANGKIT**

## A. GAMBARAN UMUM KABUPATEN PASAMAN

Kabupaten Pasaman merupakan salah satu dari 19 (sembilan belas) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, dengan luas wilayah 3.947,63 Km<sup>2</sup> atau setara dengan 395.041 Ha yang terdiri dari 12 kecamatan dan 62 Nagari. Secara astronomis dilintasi khatulistiwa dan berada pada 0° 54' 20,221" Lintang Utara - 0° 6' 52,305" Lintang Selatan dan 99° 44' 37,487" - 100° 21' 14,536" Bujur Timur. Ketinggian antara 50 meter sampai dengan 2.912 meter di atas permukaan laut (mdpl) dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara.
- Sebelah Selatan : Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat.
- Sebelah Timur : Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau.
- Sebelah Barat : Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara.

Secara administrasi, Kabupaten Pasaman terdiri dari 12 Kecamatan dan 62 Nagari, dengan kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Mapat Tunggul dengan luas 605,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 15,33 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman dan terdiri dari empat nagari dan 15 jorong. Sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Simpang Alahan Mati dengan luasan sebesar 69,56 Km<sup>2</sup> atau 1,76 persen dari total luas Kabupaten Pasaman dan terdiri dari 13 jorong. Dataran tertinggi di Kabupaten Pasaman berada di Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat Tunggul Selatan, sedangkan dataran terendah berada pada Kecamatan Tigo Nagari.

Pemanfaatan ruang Kabupaten Pasaman sesuai dengan rancangan Revisi RTRW dihitung berdasarkan hasil interpretasi citra satelit. Berdasarkan hasil interpretasi citra satelit tersebut, wilayah Kabupaten Pasaman didominasi oleh

tutupan lahan berupa hutan, yakni seluas 2.907,85 km<sup>2</sup> atau sebesar 73,61 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman. Namun demikian, luas hutan yang delineasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor SK.422/Kpts-II/1999, menetapkan bahwa luas hutan di Kabupaten Pasaman sebesar 2.684,73 Km<sup>2</sup>.

Selain itu, klasifikasi tutupan lahan yang juga memiliki luasan yang cukup besar yaitu berupa semak belukar dengan luasan sebesar 558,41 km<sup>2</sup> atau sebesar 14,14 persen dari luas wilayah Kabupaten Pasaman. Selain itu, luasan perkebunan dan sawah juga memiliki luasan yang cukup luas di wilayah Kabupaten Pasaman, yaitu masing-masing seluas 229,07 km<sup>2</sup> dan 215,54 km<sup>2</sup>.

Jumlah penduduk Kabupaten Pasaman selama 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 31.988 orang, dimana jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 281.211 orang naik menjadi 313.199 orang pada tahun 2023 dengan rata-rata pertumbuhan 2,40 persen pertahun. Meskipun secara rata-rata laju pertumbuhan penduduk tinggi, namun tiga tahun terakhir mengalami perlambatan walaupun mengalami fluktuasi dengan laju pertumbuhan tahun 2023 sebesar 1,88.

Penduduk Kabupaten Pasaman tersebar secara tidak merata dengan kepadatan penduduk rata-rata 79 orang/km. Kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Padang Gelugur 191 orang/km dan kepadatan penduduk terendah di Kecamatan Mapat Tunggul yakni 17 orang/km. Kepadatan penduduk ini berfluktuasi selama 5 tahun terakhir dimana kepadatan tertinggi selalu didominasi oleh Kecamatan Panti dan Padang Gelugur dan kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Mapat Tunggul yang disebabkan karena laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak diimbangi dengan migrasi penduduk.

Berdasarkan kelompok umur bahwa 67,76 persen penduduk Kabupaten Pasaman berada pada usia produktif dan jika dibandingkan dengan usia non produktif maka angka ketergantungan (*dependency ratio*) Kabupaten Pasaman

adalah 48 artinya setiap 100 orang berusia produktif menanggung 48 orang usia non produktif. *Dependency ratio* ini termasuk kategori rendah sehingga menjadi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi akan lebih tinggi.

Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Tahun 2025 sebanyak 322.940 orang, dan naik menjadi 342.140 orang pada tahun 2029. Selama 5 tahun ke depan, jumlah penduduk Kabupaten Pasaman diproyeksikan bertambah sebesar 19.200 orang. Sedangkan proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Pasaman hingga tahun 2029 sebesar 87 orang/Km<sup>2</sup>.

## **B. KONDISI DAERAH SAAT INI**

### **1. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia**

Kualitas sumber daya manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai tahun 2024 IPM Kabupaten Pasaman masih berada dibawah Nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman berada pada urutan ke 18 dari 19 atau pada posisi kedua terendah setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini mengindikasikan rendahnya kualitas sumber daya manusia Kabupaten Pasaman dibandingkan kabupaten/kota di Sumatera Barat. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menunjukkan belum kuatnya transformasi sosial yang disebabkan oleh belum meratanya pemenuhan layanan pendidikan berkualitas, belum meratanya pemenuhan layanan kesehatan berkualitas serta belum kuatnya pelaksanaan perlindungan sosial.

#### **a. Belum meratanya pemenuhan layanan pendidikan yang berkualitas**

Belum meratanya pemenuhan pendidikan yang berkualitas menyebabkan rendahnya Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Pasaman dibandingkan kabupaten/kota lain di Sumatera Barat serta masih rendahnya persentase sekolah yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional. Permasalahan yang dihadapi dalam pemenuhan pendidikan berkualitas yaitu :

- 1) Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan mulai dari tingkat dasar sampai tingkat menengah.
- 2) Belum optimalnya akses pendidikan.
- 3) Belum optimalnya kapasitas, kualitas dan distribusi tenaga pendidik dan kependidikan.
- 4) Rendahnya kualitas lulusan sehingga produktivitas dan daya saing masih rendah, baik di tingkat nasional, apalagi internasional.
- 5) Masih tingginya Anak Tidak Sekolah karena Drop Out.
- 6) Minimnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintah dan kementerian agama terkait data ATS, AKS, APS, dan APK baik pendidikan formal maupun nonformal.
- 7) Belum optimalnya pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini.

b. Belum meratanya pemenuhan layanan kesehatan yang berkualitas

Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pasaman masih dibawah Nasional dan Provinsi Sumatera Barat dan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Sumatera Barat UHH berada pada posisi kedua terendah ( peringkat 18 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat). Selain itu Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) serta prevalensi stunting juga masih tinggi yang berdampak pada masih rendahnya derajat kesehatan masyarakat, hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Pasaman belum mampu memenuhi pemerataan layanan kesehatan yang berkualitas yang disebabkan oleh

- 1) Belum meratanya pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas.
- 2) Belum optimalnya kapasitas dan kualitas serta pemerataan SDM kesehatan diseluruh wilayah Kabupaten Pasaman.
- 3) Masih rendahnya asupan gizi dan akses terhadap layanan kesehatan terutama dalam 1000 HPK, rendahnya layanan air minum dan sanitasi dan kondisi lingkungan lainnya termasuk topografi wilayah.

- 4) Belum optimalnya pengendalian penyakit.
- 5) Belum optimalnya akses masyarakat terhadap informasi kesehatan.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat.
- 7) Belum optimalnya koordinasi lintas sektor .

c. Belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial

Perlindungan sosial bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas perlindungan bagi masyarakat rentan miskin. Masyarakat miskin Kabupaten Pasaman berjumlah 19.990 jiwa atau 6,8%. Tingkat kemiskinan ini lebih tinggi dari tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan berada pada posisi kelima tertinggi dari kabupaten/kota di Sumatera Barat. Masih tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan belum optimalnya penyelenggaraan perlindungan sosial yang disebabkan oleh :

- 1) Masih rendahnya akurasi data kemiskinan sehingga program penanggulangan kemiskinan tidak tepat sasaran.
- 2) Belum optimalnya integrasi layanan dan sistem administrasi kependudukan sebagai basis perencanaan pembangunan.
- 3) Masih lemahnya kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
- 4) Belum optimalnya pelayanan sosial yang diberikan dalam penanganan penyandang disabilitas miskin dan rentan.
- 5) Belum teridentifikasi informasi kebutuhan tenaga kerja disabilitas di sektor formal.
- 6) Program pengentasan kemiskinan belum berbasis pemberdayaan ekonomi.
- 7) Ancaman bencana dan belum optimalnya penanganan korban pasca bencana menyebabkan meningkatnya jumlah penduduk miskin.

2. Pertumbuhan Ekonomi Belum Inklusif dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman masih rendah dan belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi masih

didominasi oleh sektor pertanian yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Pasaman, namun belum mampu menggerakkan percepatan pertumbuhan ekonomi sehingga pertumbuhan ekonomi masih melambat. Hal ini menandakan belum optimalnya penguatan transformasi ekonomi yang disebabkan oleh :

- 1) Semakin rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB disebabkan karena sektor primer (gabah ataupun bahan mentah lainnya) masih menjadi andalan ekspor Kabupaten Pasaman sehingga tidak masuk dalam perhitungan kontribusi terhadap PDRB.
- 2) Belum optimalnya produktivitas sektor pertanian, perikanan dan kehutanan disebabkan masih rendahnya infrastruktur pertanian, penggunaan teknologi pertanian, inovasi serta masih rendahnya kapasitas petani dan penyuluh pertanian dan masih belum optimalnya pengendalian penanggulangan bencana pertanian. Selain itu rendahnya produktivitas disebabkan belum maksimalnya intensifikasi penggunaan lahan serta semakin berkurangnya proporsi lahan pertanian yang dikonversi ke penggunaan non pertanian.
- 3) Rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja disebabkan rendahnya value added sektor pertanian sebagai lapangan usaha dominan tenaga kerja Kabupaten Pasaman.
- 4) Masih rendahnya deindustrialisasi terlihat dari masih rendahnya kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB yang disebabkan oleh rendahnya penggunaan teknologi dan inovasi, rendahnya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia.
- 5) Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pariwisata, kurangnya promosi dan branding, minimnya pelibatan masyarakat lokal, minimnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata, belum adanya kerjasama dengan badan usaha serta degradasi lingkungan akibat pengelolaan pariwisata yang tidak terkendali.
- 6) Ekonomi kreatif belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber ekonomi baru disebabkan terbatasnya ketersediaan data ekonomi kreatif,

lemahnya kelembagaan ekonomi kreatif dan rendahnya daya saing ekonomi kreatif.

- 7) Masih rendahnya peranan UMKM dan Koperasi disebabkan oleh rendahnya keterkaitan UMKM dan Koperasi dengan rantai nilai produksi karena keterbatasan teknologi, inovasi, akses modal dan rendahnya kapasitas serta keahlian sumber daya yang bekerja pada UMKM dan Koperasi.
- 8) Belum optimalnya peranan BUMNag dalam meningkatkan perekonomian masyarakat disebabkan minimnya fasilitasi BUMNag oleh instansi terkait dan masih rendahnya kapasitas dan kualitas pengelola BUMNag.
- 9) Masih rendahnya ROA BUMD yang menunjukkan belum optimalnya peranan BUMD terhadap perekonomian disebabkan oleh besarnya beban operasional BUMD daripada produktivitas yang dihasilkan.
- 10) Belum optimalnya pengelolaan perhutanan sosial oleh masyarakat disebabkan terbatasnya kewenangan dan peranan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), terbatasnya keterlibatan para pihak dan masih rendahnya produktivitas hasil hutan kayu dan non kayu.
- 11) Masih rendahnya realisasi penanaman modal dan investasi disebabkan oleh belum optimalnya kerjasama dan fasilitasi bagi investor, perbankan dan lembaga keuangan lainnya dalam rangka pengembangan investasi dan usaha, belum adanya perusahaan menengah dan besar yang berinvestasi di Kabupaten Pasaman. Selain itu permasalahan investasi terkendala pada lahan investasi yang sebagian besar berada pada lahan pertanian dan tanah ulayat sementara regulasi yang mengatur alih fungsi lahan belum tersedia.
- 12) Rendahnya Pembentukan Modal Tetap Bruto disebabkan modal bruto didominasi oleh modal pemerintah dan rendahnya peran serta masyarakat dan swasta dalam pengembangan Investasi.
- 13) Tidak tercatatnya nilai ekspor produk pertanian dan sektor lainnya yang dimiliki Kabupaten Pasaman di lintas batas provinsi Sumatera Barat.
- 14) Rendahnya Local Taxing Power Kabupaten Pasaman disebabkan belum optimalnya pemungutan pajak oleh pemerintah.

- 15) Belum optimalnya pertambangan rakyat disebabkan oleh minimnya fasilitasi perizinan pertambangan sehingga pertambangan ilegal marak terjadi.
- 16) Masih tingginya tingkat pengangguran terbuka disebabkan rendahnya produktivitas dan kapasitas tenaga kerja serta terbatasnya lapangan kerja yang tersedia.
- 17) Menurunnya partisipasi angkatan kerja perempuan disebabkan pernikahan dan mengurus rumah tangga.

3. Belum meratanya pemenuhan infrastruktur yang berkualitas

Topografi Kabupaten Pasaman yang terdiri dari dataran tinggi, dataran rendah, perbukitan dan pegunungan dengan curah hujan yang tinggi sangat berpengaruh terhadap pemerataan infrastruktur yang berkualitas. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat disebabkan oleh :

- a. Belum optimalnya akses dan konektivitas dalam kabupaten dan dengan kabupaten/provinsi tetangga disebabkan karena terbatasnya anggaran pembangunan dan masih belum optimalnya koordinasi dengan kabupaten dan provinsi tetangga ataupun kementerian/lembaga terkait sehingga pembangunan yang dilakukan kabupaten/provinsi tetangga di daerah perbatasan oleh kabupaten/provinsi tetangga tidak menjadi prioritas. Selain itu masih rendahnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan disebabkan belum lengkapnya persyaratan administrasi untuk pengajuan pembangunan melalui dana pusat.
- b. Masih rendahnya tingkat kemantapan jalan disebabkan belum optimalnya kualitas pekerjaan jalan, belum optimalnya kualitas perencanaan teknis, masih rendahnya kesesuaian jalan dengan bentang alam serta masih rendahnya kualitas SDM konstruksi.
- c. Belum optimalnya pengembangan perumahan dan pemukiman layak disebabkan karena masih terdapat pembangunan rumah masyarakat yang tidak sesuai Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2016 tentang

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Saat ini masih terdapat 3 kecamatan yang merupakan permukiman kumuh di Kabupaten Pasaman yang harus menjadi perhatian pemerintah dan segera untuk dituntaskan yaitu Kecamatan Panti, Padang Gelugur dan Rao Selatan.

- d. Masih rendahnya rumah tangga bersanitasi layak disebabkan belum semua rumah tangga memiliki akses sanitasi layak dan aman, masih tingginya tingkat BABS, minimnya sarana prasarana, kurangnya koordinasi kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan sanitasi serta belum terbangunnya budaya hidup bersih masyarakat dan kurangnya pengetahuan kesehatan masyarakat.
- e. Masih rendahnya rumah tangga berakses air minum aman disebabkan terbatasnya sarana pelayanan air minum perkotaan dan perdesaan serta curah hujan yang tinggi dan kelerengan yang cukup curam menyebabkan kualitas air baku air minum semakin rendah salah satunya terjadi kekeruhan di hulu ketika curah hujan terlalu tinggi.
- f. Kurang optimalnya jaringan irigasi dalam mendukung usaha budidaya pertanian masyarakat petani yang disebabkan pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi yang rendah dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola jaringan irigasi. Saat ini jaringan irigasi dalam kondisi baik hanya 34,33%. Angka ini masih jauh dari pemenuhan kebutuhan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Pasaman mengingat pertanian merupakan salah satu sektor basis yang menunjang perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, lima tahun kedepan perlu peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi guna memenuhi kebutuhan pertanian. Selain itu, juga dibutuhkan peningkatan partisipasi masyarakat sebagai petani pemakai air untuk pemeliharaan jaringan demi meningkatnya keberfungsian jaringan irigasi dari hulu hingga hilir.
- g. Belum optimalnya ketaatan terhadap RTRW yang disebabkan oleh minimnya informasi dan kurangnya pengelolaan tata ruang kepada masyarakat sebagai dasar penyelenggaraan pengaturan tata ruang wilayah

dan tata ruang rinci, pengaturan tata bangunan dan tata lingkungan, serta pembinaan tata ruang sehingga perlu adanya legalisasi serta regulasi sebagai pedoman dalam pengaturan tata ruang wilayah di Kabupaten Pasaman.

#### 4. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pemerintahan

Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan menyebabkan tumpang tindihnya regulasi dan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga pelayanan publik tidak berkualitas dan pemerintahan tidak terlaksana secara efektif dan akuntabel. Hal ini mengindikasikan belum terlaksananya transformasi tata kelola. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan disebabkan oleh :

- 1) Belum profesionalnya pengelolaan pemerintahan sebagai akibat dari penempatan ASN yang belum sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- 2) Belum efektifnya regulasi disebabkan adanya regulasi yang tumpang tindih, rendahnya kualitas regulasi dan lemahnya pemantauan dampak regulasi.
- 3) Belum optimalnya tata kelola kelembagaan yang disebabkan struktur kelembagaan masih terfragmentasi dan tidak efektif.
- 4) Belum optimalnya transformasi digital disebabkan belum meratanya jaringan telekomunikasi dan masih terdapat beberapa kejurongan yang belum bisa diakses jaringan internet akibat topografi dan bentangan wilayah Kabupaten Pasaman yang cukup luas dengan sarana jaringan telekomunikasi yang masih terbatas. Selain itu transformasi digital juga dihadapkan pada tantangan siber serta rendahnya literasi digital.
- 5) Belum optimalnya pelayanan publik yang berkualitas disebabkan keterbatasan infrastruktur digital dan terbatasnya kapasitas SDM.
- 6) Masih rentan terhadap resiko korupsi yang ditandai dengan masih rendahnya Indeks Survey Penilaian Integritas yang disebabkan oleh

belum optimalnya sosialisasi anti korupsi, masih lemahnya pengawasan institusi penegak hukum baik internal maupun eksternal.

5. Belum optimalnya ketahanan budaya dan ekologi

Terdapat sejumlah tanggapan dalam ketahanan budaya dan ekologi diantaranya :

- 1) Belum jelasnya formulasi dan implementasi falsafah ABS SBK dalam mewujudkan masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju.
- 2) Belum optimalnya fungsi tigo tungku sajarangan sebagai norma kepemimpinan masyarakat dalam mewujudkan falsafat ABS SBK.
- 3) Belum optimalnya pengembangan kebudayaan disebabkan belum terdokumentasinya objek kebudayaan dengan baik dan belum seluruh objek kebudayaan yang ditetapkan sebagai cagar budaya sehingga pelestarian dan pemajuannya sulit untuk diwujudkan.
- 4) Masyarakat kabupaten Pasaman memiliki kebudayaan khas daerah yang didominasi oleh budaya Minangkabau dan Mandailing, namun kebudayaan tersebut belum optimal sebagai karakter dasar yang berlandaskan pada falsafah ABS SBK
- 5) Belum optimalnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga serta masih tingginya ketimpangan gender disebabkan masih rendahnya pemberdayaan perempuan, masih rendahnya peranan perempuan dalam pembangunan, belum kuatnya pemahaman peran dalam keluarga, pengaruh lingkungan serta kemajuan teknologi informasi yang tidak dibarengi dengan kesiapan mental/karakter anak-anak dalam menyaring informasi yang disediakan teknologi tersebut.
- 6) Belum optimalnya pengelolaan sampah disebabkan minimnya fasilitas pengolahan sampah yang memadai, belum optimalnya layanan penuh pengumpulan sampah, belum optimalnya penanggulangan melalui pemilahan sampah, sistem pengumpulan sampah yang belum terintegrasi dengan baik, masih rendahnya pemahaman masyarakat

dalam penanggulangan sampah serta masih rendahnya pengolahan sampah sebagai sumber ekonomi sirkular.

- 7) Belum optimalnya penggunaan lahan berkelanjutan disebabkan alih fungsi lahan dan pemanfaatan lahan tidak sesuai peruntukannya.
- 8) Peningkatan populasi yang tidak diimbangi dengan pengelolaan sumber daya yang baik sehingga meningkatkan tekanan terhadap daya tampung lingkungan.
- 9) Urbanisasi yang tidak terkontrol memperparah masalah ini dengan memperluas area pemukiman tanpa memperhatikan aspek lingkungan.
- 10) Kerusakan lingkungan akibat tidak terkendalinya aktivitas pertambangan
- 11) Belum optimalnya pengelolaan dan penanggulangan bencana dengan Indeks Resiko Bencana masih termasuk resiko bencana tinggi, yang disebabkan oleh belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, masih terbatasnya sarana prasarana C. kebencanaan, belum memadainya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung penanggulangan bencana dan belum dilibatkannya kearifan lokal dan prinsip membangun kembali lebih baik daripada rehabilitasi dan reskontruksi.

### **C. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasaman Tahun 2025-2029**

#### **1. Isu Strategis Transformasi Sosial**

Transformasi sosial akan menjadi kunci penting pembangunan sumber daya manusia dalam menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Transformasi sosial dihadapkan pada permasalahan belum meratanya pemenuhan layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta belum optimalnya perlindungan sosial. Transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan kesehatan yang berkualitas agar setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan dan gizi, pemenuhan

pelayanan pendidikan yang berkualitas agar setiap orang mempunyai ilmu pengetahuan, menguasai teknologi dan inovasi dengan setara dan pemenuhan perlindungan sosial agar setiap orang mempunyai status sosial yang sama dan setara serta dapat mengentaskan kemiskinan dan melindungi masyarakat rentan miskin. Isu strategis dalam rangka memperkuat pondasi transformasi sosial diantaranya melanjutkan pendidikan gratis dan kesehatan gratis yang berkualitas melalui Universal Health Coverage (UHC).

## 2. Isu Strategis Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi menjadi kunci dalam peningkatan perekonomian masyarakat yang saat ini pendapatan perkapita masih berada pada posisi menengah kebawah dan pengeluaran perkapita Kabupaten Pasaman masih sangat rendah dan berada pada posisi ke 18 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat. Sisi pengeluaran perlu peningkatan daya saing ekonomi dengan prioritas pada sektor pertanian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB. Menurunnya kontribusi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan terhadap PDRB memerlukan penguatan hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah yang dapat dilakukan dengan memperkuat kapasitas dan kualitas kelembagaan serta sumber daya manusia UMKM, Koperasi, BUMD dan BUMNag. Kondisi topografi Kabupaten Pasaman dengan bentang alam yang unik dan peninggalan sejarah dan budaya yang beragam menuntut pengembangan pariwisata edukasi berbasis kebumian dan ekonomi kreatif. produktivitas tenaga kerja yang berkemampuan dan berpengetahuan tinggi.

Selain itu isu pemanfaatan pertambangan berkelanjutan perlu menjadi perhatian lima tahun kedepan mengingat Kabupaten Pasaman merupakan salah satu kabupaten dengan area pertambangan yang cukup luas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan perekonomian masyarakat.

## 3. Isu Strategis Transformasi Tata Kelola

Untuk dapat menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas diperlukan pemerintahan yang efektif dan akuntabel yang dapat diwujudkan melalui transformasi tata kelola. Tata kelola pemerintahan yang baik akan didukung oleh regulasi yang berkualitas dan penegakan hukum yang baik serta SDM aparatur yang berkualitas yang responsif dan adaptif terhadap perkembangan dan teknologi. Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa isu dalam upaya transformasi tata kelola diantaranya regulasi berkualitas, kelembagaan yang efektif, pelayanan publik berkualitas, digitalisasi sistem pemerintahan yang merata dan berkualitas, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

#### **D. VISI**

##### **PASAMAN YANG BERKARAKTER, MAJU, DAN BERKELANJUTAN UNTUK PASAMAN BANGKIT**

- Berkarakter** : Memiliki makna kondisi masyarakat berbudaya dengan kepribadian luhur, bermoral, identitas yang kuat sesuai kearifan lokal berpadu dalam pembangunan.
- Maju** : Suatu kondisi masyarakat Kabupaten Pasaman yang makmur dan sentosa dengan tingkat kesejahteraan tinggi.
- Berkelanjutan** : Suatu kondisi konsistensi pembangunan Kabupaten Pasaman yang menunjukkan aktifitas berdaya guna dan berhasil guna hingga pencapaian tujuan.
- Pasaman Bangkit** : Suatu kondisi teratasinya masalah dan kesulitan Kabupaten Pasaman menuju kesejahteraan.

#### **E. MISI**

1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa, berlandaskan “ ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”

Dalam upaya membangun masyarakat yang berkarakter, harmonis dan sejahtera, kami mengusung misi untuk mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beriman, dan bertaqwa. Misi ini berakar pada prinsip “ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH,” yang merupakan landasan utama dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Secara definisi misi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Masyarakat yang Berbudaya:

Kami berkomitmen untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal yang kaya dan beragam. Budaya Minangkabau, dengan segala adat istiadatnya, merupakan identitas yang harus dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Melalui berbagai program pendidikan dan kegiatan budaya, kami akan memastikan bahwa nilai-nilai luhur budaya tetap hidup dan relevan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Masyarakat yang Beriman:

Keimanan adalah fondasi utama dalam membentuk karakter individu yang kuat dan berintegritas. Kami akan mendorong penguatan keimanan melalui pendidikan agama yang komprehensif dan kegiatan keagamaan yang rutin. Dengan demikian, setiap anggota masyarakat dapat menjalankan ajaran agama dengan baik dan menjadikannya sebagai pedoman dalam setiap aspek kehidupan.

c. Masyarakat yang Bertaqwa:

Taqwa adalah manifestasi dari keimanan yang tercermin dalam perilaku sehari-hari. Kami akan mengupayakan terciptanya lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan ketakwaan, baik melalui pembinaan spiritual maupun melalui kebijakan yang mendukung kehidupan yang bersih dan jujur. Dengan demikian, masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan saling menghormati.

d. Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah:

Prinsip ini menegaskan bahwa adat istiadat harus selalu selaras dengan ajaran agama Islam. Kami akan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dijalankan selalu berlandaskan pada nilai-nilai agama dan adat yang telah diwariskan oleh leluhur. Dengan demikian, kita dapat membangun

masyarakat yang tidak hanya maju secara material, tetapi juga kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral.

2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kami mengusung misi untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan. Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap wilayah mendapatkan akses yang adil terhadap infrastruktur yang memadai, serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan sosial.

- a. **Pemerataan Infrastruktur:** Kami berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang merata di seluruh wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan. Dengan pembangunan jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan yang tersebar merata, kami berharap dapat mengurangi kesenjangan antarwilayah dan meningkatkan konektivitas. Hal ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi.
- b. **Infrastruktur Berkelanjutan:** Pembangunan infrastruktur harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kami akan mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan praktik pembangunan yang efisien dalam penggunaan sumber daya. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang.
- c. **Peningkatan Kualitas Hidup:** Infrastruktur yang baik akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kami akan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur yang dijalankan dapat memberikan manfaat nyata, seperti akses air bersih, sanitasi yang layak, dan transportasi yang aman dan nyaman. Dengan demikian, masyarakat dapat menikmati kehidupan yang lebih sehat dan produktif.
- d. **Kolaborasi dan Inovasi:** Kami akan mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur. Melalui kemitraan yang kuat, kami dapat mengoptimalkan sumber daya dan

menciptakan inovasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif dari semua pihak akan memastikan bahwa setiap proyek infrastruktur dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

- e. Pengawasan dan Transparansi: Untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan bebas dari korupsi, kami akan menerapkan sistem pengawasan yang ketat dan transparan. Setiap tahap pembangunan akan diawasi dengan cermat, dan laporan kemajuan akan disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terjaga. Meningkatkan daya saing daerah

### 3. Meningkatkan Daya Saing Daerah

Dalam era globalisasi yang semakin kompetitif, meningkatkan daya saing daerah menjadi kunci untuk mencapai kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Misi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan pembangunan berkelanjutan.

- a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Dengan SDM yang terampil dan berdaya saing tinggi, daerah kita akan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
- b. Inovasi dan Teknologi: Inovasi adalah kunci untuk memenangkan persaingan. Kami akan mendorong penggunaan teknologi terkini dan mendukung penelitian serta pengembangan (R&D) untuk menciptakan produk dan layanan yang inovatif. Dengan demikian, kita dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor.
- c. Peningkatan Infrastruktur: Infrastruktur yang andal dan berkualitas merupakan fondasi utama untuk meningkatkan daya saing daerah. Kami akan memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan, termasuk jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan pendidikan

- d. Penguatan Ekonomi Lokal: Kami akan mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan memberikan akses keuangan, pelatihan, dan pendampingan. UMKM yang kuat akan menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.
  - e. Kolaborasi dan Kemitraan: Kami akan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang positif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.
  - f. Keberlanjutan Lingkungan: Pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan aspek lingkungan. Kami akan mengadopsi praktik-praktik ramah lingkungan dalam setiap proyek pembangunan untuk memastikan kelestarian alam dan kualitas hidup yang lebih baik bagi generasi mendatang.
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah

Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang Amanah, transparan, akuntabel, dan berintegritas dan kami mengusung misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah. Misi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pemerintah dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Adapun penjelasan misi ini dapat kami jelaskan sebagai berikut :

- a. Transparansi dalam Pemerintahan: Kami berkomitmen untuk menjalankan pemerintahan yang terbuka dan transparan. Setiap keputusan dan kebijakan akan disampaikan secara jelas kepada masyarakat, sehingga mereka dapat memahami dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan transparansi, kami berharap dapat mengurangi potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- b. Akuntabilitas Publik: Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Kami akan memastikan bahwa setiap program dan proyek pemerintah memiliki mekanisme pengawasan yang ketat dan laporan

- yang terbuka untuk publik. Dengan akuntabilitas yang tinggi, kami dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah
- c. Integritas dan Etika: Kami akan menanamkan nilai-nilai integritas dan etika dalam setiap aspek pemerintahan. Setiap pejabat dan pegawai pemerintah akan diberikan pelatihan dan pembinaan untuk memastikan bahwa mereka menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Integritas adalah kunci untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
  - d. Pelayanan Publik yang Berkualitas: Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas. Setiap layanan yang diberikan kepada masyarakat akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dengan pelayanan publik yang baik, kami berharap dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.
  - e. Partisipasi Masyarakat: Kami akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Melalui forum-forum konsultasi publik dan mekanisme umpan balik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan masukan mereka. Partisipasi masyarakat adalah elemen penting dalam menciptakan pemerintahan yang demokratis dan responsif.
  - f. Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien: Kami akan memastikan bahwa setiap sumber daya yang dimiliki pemerintah dikelola dengan efisien dan efektif. Pengelolaan anggaran yang baik dan penggunaan teknologi informasi akan membantu dalam mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Dengan pengelolaan yang efisien, kami dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat
5. Mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh.

Dalam upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kami mengusung misi untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh. Misi ini bertujuan untuk

memberdayakan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan inklusif.

- a. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Kami berkomitmen untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui pelatihan, akses permodalan, dan pendampingan, kami akan membantu UMKM tumbuh dan berkembang, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
- b. Pengembangan Kewirausahaan: Kami akan mendorong semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat dengan menyediakan program pelatihan dan bimbingan. Dengan keterampilan dan pengetahuan yang memadai, masyarakat dapat memulai dan mengembangkan usaha mereka sendiri, sehingga dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.
- c. Akses ke Pasar dan Teknologi: Kami akan memfasilitasi akses UMKM ke pasar yang lebih luas, baik lokal maupun internasional. Selain itu, kami akan mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing produk lokal. Dengan demikian, produk-produk lokal dapat bersaing di pasar global dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
- d. Penguatan Jaringan dan Kemitraan: Kami akan membangun jaringan dan kemitraan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung pengembangan ekonomi kerakyatan yang tangguh. Dengan kemitraan yang kuat, kami dapat mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas.
- e. Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui pengentasan kemiskinan, kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya akan memastikan bahwa setiap anggota masyarakat dapat hidup dengan lebih sejahtera dan produktif.

- f. Keberlanjutan dan Inklusivitas: Kami akan memastikan bahwa setiap program pengentasan kemiskinan dilakukan dengan prinsip keberlanjutan dan inklusivitas. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan akan menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.

6. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan inovatif.

Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika perubahan yang cepat, kami mengusung misi untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkarakter dan inovatif. Misi ini bertujuan untuk menciptakan individu-individu yang tidak hanya memiliki kompetensi tinggi, tetapi juga memiliki integritas dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

- a. Pengembangan Karakter: Kami berkomitmen untuk membentuk SDM yang memiliki karakter kuat, seperti integritas, tanggung jawab, dan etika kerja yang tinggi. Melalui pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler, kami akan memastikan bahwa setiap individu memiliki landasan moral yang kokoh dan mampu menjadi teladan dalam masyarakat.
- b. Peningkatan Kreativitas dan Inovasi: Kreativitas dan inovasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Kami akan mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreatif melalui berbagai program pelatihan dan kompetisi. Dengan demikian, SDM yang dihasilkan akan mampu menciptakan solusi inovatif untuk berbagai permasalahan yang dihadapi.
- c. Pendidikan dan Pelatihan Berkualitas: Kami akan memastikan bahwa setiap individu mendapatkan akses ke pendidikan dan pelatihan yang berkualitas. Melalui peningkatan fasilitas pendidikan, penggunaan teknologi modern, dan pengembangan kurikulum yang relevan, kami akan mempersiapkan SDM yang siap bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

- d. Pengembangan Talenta: Kami akan mengidentifikasi dan mengembangkan talenta-talenta potensial melalui program manajemen talenta yang terintegrasi. Dengan memberikan dukungan dan fasilitas yang diperlukan, kami akan memastikan bahwa setiap individu dapat mengembangkan potensi maksimal mereka dan berkontribusi secara optimal dalam berbagai bidang.
  - e. Kolaborasi dan Kemitraan: Kami akan membangun kemitraan yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini akan menciptakan sinergi yang positif untuk mendukung pengembangan SDM yang berkarakter dan inovatif. Dengan kemitraan yang kuat, kami dapat mengoptimalkan sumber daya dan menciptakan peluang yang lebih luas bagi pengembangan SDM.
  - f. Lingkungan Belajar yang Inspiratif: Kami akan menciptakan lingkungan belajar yang inspiratif dan mendukung pengembangan karakter dan inovasi. Melalui pendekatan pembelajaran yang holistik dan kontekstual, kami akan memastikan bahwa setiap individu dapat belajar dengan cara yang menyenangkan dan efektif
7. Mewujudkan sektor pertanian dan perikanan yang handal.

Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat, kami mengusung misi untuk mewujudkan sektor pertanian dan perikanan yang handal. Misi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pertanian dan perikanan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu bersaing di pasar global. Penjelasan misi dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Peningkatan Produktivitas: Kami berkomitmen untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan melalui penerapan teknologi modern dan praktik terbaik. Dengan penggunaan teknologi yang tepat, kami berharap dapat meningkatkan hasil panen dan tangkapan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri dan meningkatkan pendapatan petani dan pembudidaya ikan.
- b. Pengembangan Infrastruktur: Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mendukung sektor pertanian dan perikanan yang handal. Kami akan

- memastikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur seperti irigasi, jalan akses, pelabuhan perikanan, dan fasilitas penyimpanan yang memadai. Dengan infrastruktur yang baik, distribusi hasil pertanian dan perikanan akan lebih efisien dan mengurangi kerugian pasca panen.
- c. Penguatan SDM: Kami akan mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi melalui pelatihan dan pendidikan yang relevan. Petani dan nelayan akan diberikan akses ke program pelatihan yang berfokus pada teknik budidaya, manajemen usaha, dan penggunaan teknologi. Dengan SDM yang handal, sektor pertanian dan perikanan akan lebih produktif dan inovatif.
  - d. Keberlanjutan Lingkungan: Kami akan memastikan bahwa setiap kegiatan pertanian dan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Praktik-praktik ramah lingkungan seperti pertanian organik, pengelolaan sumber daya air yang efisien, dan penangkapan ikan yang berkelanjutan akan diterapkan untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya hayati.
  - e. Akses ke Pasar: Kami akan memfasilitasi akses petani dan nelayan ke pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Melalui pengembangan jaringan pemasaran dan promosi produk, kami berharap dapat meningkatkan daya saing produk pertanian dan perikanan di pasar global. Dengan akses pasar yang lebih baik, pendapatan petani dan nelayan akan meningkat.
  - f. Inovasi dan Riset: Kami akan mendorong inovasi dan riset dalam sektor pertanian dan perikanan untuk menciptakan solusi yang efektif dan efisien. Melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan perguruan tinggi, kami akan mengembangkan teknologi baru dan praktik terbaik yang dapat diterapkan oleh petani dan nelayan.
8. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana

Dalam menghadapi berbagai ancaman bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, kami mengusung misi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Misi ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang siap

menghadapi bencana, meminimalkan dampak negatif, dan mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Misi ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Kapasitas Kesiapsiagaan: Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat melalui edukasi dan pelatihan yang berkelanjutan. Program-program pelatihan akan mencakup simulasi bencana, penyusunan rencana evakuasi, dan pengenalan alat-alat keselamatan. Dengan demikian, masyarakat akan lebih siap dan tanggap dalam menghadapi situasi darurat.
- b. Penguatan Sistem Peringatan Dini: Sistem peringatan dini yang efektif adalah kunci untuk mengurangi risiko bencana. Kami akan mengembangkan dan memperkuat sistem peringatan dini yang dapat memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat. Teknologi modern seperti aplikasi mobile dan sirene peringatan akan digunakan untuk memastikan bahwa informasi bencana dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
- c. Koordinasi dan Kolaborasi: Penanggulangan bencana memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga swasta, dan masyarakat. Kami akan membangun mekanisme koordinasi yang efektif untuk memastikan bahwa setiap pihak dapat berperan aktif dalam penanggulangan bencana. Kolaborasi ini akan mencakup pembagian tugas yang jelas dan komunikasi yang lancar.
- d. Pengelolaan Risiko Bencana: Kami akan mengintegrasikan pengelolaan risiko bencana dalam setiap aspek pembangunan. Melalui pendekatan ini, kami akan memastikan bahwa setiap proyek pembangunan memperhatikan potensi risiko bencana dan mengadopsi langkah-langkah mitigasi yang tepat. Dengan demikian, kita dapat mengurangi kerentanan dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana.
- e. Pemulihan dan Rehabilitasi: Proses pemulihan pasca bencana harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Kami akan memastikan bahwa setiap upaya pemulihan dan rehabilitasi dilakukan dengan pendekatan yang holistik, mencakup aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Bantuan dan dukungan akan

- diberikan kepada masyarakat terdampak untuk mempercepat proses pemulihan dan mengembalikan kehidupan mereka ke kondisi normal.
- f. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat adalah elemen penting dalam kesiapsiagaan bencana. Kami akan menjalankan kampanye edukasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan dan tanggap bencana. Melalui partisipasi aktif, masyarakat dapat berkontribusi dalam upaya pengurangan risiko bencana dan membangun komunitas yang lebih tangguh.

## **F. PROGRAM AKSI**

Kabupaten Pasaman diharapkan memanfaatkan potensi daerah dan sumber daya ramah lingkungan dan kearifan lokal serta didukung dengan tata kelola pemerintahan yang amanah, akan menjamin Pasaman Bangkit dan lebih baik kedepannya. Sehingga Visi “Pasaman yang Berkarakter, Maju dan Berkelanjutan untuk Pasaman Bangkit” diterjemahkan dalam misi Kabupaten Pasaman yang dijabarkan melalui program aksi yang lebih rinci dengan mendasarkan pada nilai berbudaya, beriman dan bertaqwa, daya saing daerah, dan tata kelola pemerintahan.

1. Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa, berlandaskan “ ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH”, Adapun program aksi yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:
  - b. Penguatan Pendidikan Agama dan Moral:
    - Meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum yang komprehensif dan tenaga pengajar yang kompeten.
    - Mengadakan program pendidikan moral dan karakter yang berbasis pada nilai-nilai adat dan agama untuk membentuk generasi yang berintegritas dan bertanggung jawab.
  - c. Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal:

- Meningkatkan peran serta Niniak Mamak dan lembaga adat dalam pelestarian budaya dan kearifan lokal.
  - Mendorong pelestarian budaya lokal melalui kegiatan seni dan budaya seperti festival, pameran, dan lomba seni tradisional.
  - Mengembangkan pusat-pusat kebudayaan dan museum yang menampilkan kekayaan budaya Pasaman untuk meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap warisan budaya mereka.
- d. Peningkatan Kualitas Tempat Ibadah:
- Membangun dan atau membantu merenovasi tempat-tempat ibadah seperti masjid dan surau untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan kondusif bagi kegiatan keagamaan.
  - Menyediakan fasilitas pendukung seperti perpustakaan agama dan ruang belajar untuk mendukung kegiatan pendidikan agama di tempat ibadah.
- e. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Adat dan Agama:
- Mengadakan program pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai adat dan agama untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan Niniak Mamak dan masyarakat dalam pembangunan.
  - Mendorong pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan.
- f. Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah:
- Mendorong pengembangan ekonomi berbasis syariah dengan menyediakan akses permodalan dan pelatihan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
  - Mengembangkan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan koperasi syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- g. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan terhadap Hukum Adat dan Agama:
- Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan tentang hukum adat dan agama untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma yang berlaku.

- Mendorong penegakan hukum adat dan agama yang adil dan transparan untuk menciptakan masyarakat yang tertib dan harmonis.
2. Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
- a. Pembangunan Jalan dan Jembatan:
- Meningkatkan aksesibilitas antar desa dan kecamatan dengan pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan yang kokoh dan tahan lama.
  - Memastikan semua wilayah, termasuk daerah terpencil, memiliki akses jalan yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
- b. Pengembangan Infrastruktur Pendidikan dan Kesehatan:
- Membangun dan merenovasi fasilitas pendidikan seperti sekolah dan perpustakaan untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.
  - Meningkatkan fasilitas kesehatan dengan membangun puskesmas dan rumah sakit yang dilengkapi dengan peralatan medis modern dan tenaga medis yang kompeten.
- c. Penyediaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi:
- Menyediakan akses air bersih yang merata untuk seluruh masyarakat Pasaman dengan membangun instalasi pengolahan air dan jaringan distribusi yang efisien.
  - Membangun fasilitas sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kesehatan dan kebersihan lingkungan.
  - Meningkatkan peran serta masyarakat dalam kelompok pengelola system penyediaan air bersih dan sanitasi.
- d. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan:
- Mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan mengurangi emisi karbon.
  - Membangun instalasi energi terbarukan di berbagai wilayah untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan ramah lingkungan.

- e. Pembangunan Infrastruktur Digital:
    - Memperluas jaringan internet dan telekomunikasi ke seluruh wilayah Pasaman untuk mendukung konektivitas dan akses informasi.
    - Mendorong penggunaan teknologi digital dalam berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan publik.
  - f. Pengelolaan Lingkungan yang Berkelanjutan:
    - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek infrastruktur untuk memastikan kelestarian lingkungan.
    - Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan infrastruktur untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.
3. Meningkatkan daya saing daerah
- a. Pengembangan Potensi Lokal:
    - Mengidentifikasi dan mengembangkan sektor-sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
    - Meningkatkan nilai tambah produk lokal melalui pelatihan dan pendampingan kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
  - b. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
    - Menyediakan program pelatihan dan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal.
    - Mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan program magang dan pelatihan kerja.
  - c. Peningkatan Infrastruktur Ekonomi:
    - Membangun dan memperbaiki infrastruktur ekonomi seperti pasar, pusat distribusi, dan fasilitas logistik untuk mendukung aktivitas perdagangan dan industri.
    - Memperluas akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital di berbagai sektor ekonomi.

- d. Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif:
    - Menyederhanakan proses perizinan dan memberikan insentif bagi investor yang ingin menanamkan modal di Pasaman.
    - Membangun kemitraan strategis dengan investor lokal dan internasional untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah.
  - e. Promosi dan Pemasaran Daerah:
    - Mengadakan event dan pameran untuk mempromosikan produk dan potensi wisata Pasaman kepada pasar nasional dan internasional.
    - Menggunakan media digital dan sosial untuk meningkatkan visibilitas dan daya tarik Pasaman sebagai destinasi investasi dan pariwisata.
  - f. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola:
    - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah dalam melayani masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi.
    - Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance) untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi.
4. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang Amanah
- a. Menciptakan Pemerintahan yang professional dan beretika.
    - Menempatkan ASN sesuai standar kompetensi dan kinerja.
    - Pendidikan dan pelatihan etika kerja.
    - Menciptakan kepemimpinan yang berintegritas.
    - Penerapan sanksi yang tegas.
  - b. Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran:
    - Menyusun dan mempublikasikan laporan keuangan secara berkala agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai penggunaan anggaran daerah.
    - Mengadakan forum-forum diskusi publik untuk membahas prioritas anggaran dan memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
  - c. Akuntabilitas dalam Pelaksanaan Program:

- Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap setiap program dan proyek pemerintah untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - Melibatkan lembaga independen dalam audit dan evaluasi program untuk menjaga objektivitas dan integritas.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:
- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan.
  - Mengembangkan sistem pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik.
- e. Pemberantasan Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang:
- Menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap korupsi dengan memperkuat pengawasan internal dan eksternal.
  - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemerintahan melalui mekanisme pelaporan yang mudah dan aman.
- f. Penguatan Kelembagaan Pemerintahan:
- Meningkatkan koordinasi antar lembaga pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program dan kebijakan.
  - Mengembangkan kapasitas kelembagaan melalui reformasi birokrasi yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas.
- g. Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan:
- Mengadakan musyawarah dan konsultasi publik secara rutin untuk mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat.
  - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pengentasan kemiskinan melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh. Adapun program aksi yang akan kita lakukan adalah :
- a. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):
- Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas usaha mereka.

- Menyediakan akses permodalan yang mudah dan terjangkau melalui kerjasama dengan lembaga keuangan dan perbankan.
- b. Pemberdayaan Ekonomi Desa:
- Mendorong pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa.
  - Mengembangkan potensi lokal seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan tangan untuk menciptakan produk unggulan desa yang memiliki nilai jual tinggi.
- c. Peningkatan Akses Pasar:
- Membuka akses pasar bagi produk lokal melalui pameran, bazar, dan platform e-commerce.
  - Membangun jaringan distribusi yang efisien untuk memastikan produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.
- d. Pengembangan Koperasi:
- Meningkatkan peran koperasi dalam perekonomian daerah dengan memberikan pelatihan manajemen dan akses permodalan.
  - Mendorong pembentukan koperasi di berbagai sektor seperti pertanian, perdagangan, dan jasa untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.
- e. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:
- Menyediakan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi masyarakat.
  - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi melalui program pemberdayaan dan pelatihan kewirausahaan.
- f. Pengembangan Infrastruktur Pendukung:
- Membangun infrastruktur pendukung seperti pasar, pusat distribusi, dan fasilitas logistik untuk mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan.
  - Memperluas akses internet dan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital di sektor ekonomi kerakyatan.

6. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkarakter dan inovatif. Untuk hal ini kita akan lakukan dengan program aksi sebagai berikut :
  - a. Peningkatan Kualitas Pendidikan:

Meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang kompeten sesuai dengan kewenangan daerah.
  - b. Program Pelatihan dan Pengembangan Keterampilan:
    - Menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja, seperti teknologi informasi, kewirausahaan, dan keterampilan teknis.
    - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal.
  - c. Pembentukan Karakter yang Kuat:
    - Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan untuk membentuk generasi yang berintegritas, disiplin, dan bertanggung jawab.
    - Mengadakan kegiatan ekstrakurikuler dan program pengembangan diri yang mendukung pembentukan karakter positif, seperti kegiatan olahraga, seni, dan kepemimpinan.
  - d. Pengembangan Inovasi dan Kreativitas:
    - Mendorong budaya inovasi dan kreativitas di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum melalui kompetisi, workshop, dan inkubator bisnis.
    - Menyediakan dukungan dan fasilitas bagi para inovator dan wirausahawan muda untuk mengembangkan ide-ide kreatif dan solusi inovatif.
  - e. Kolaborasi dengan Dunia Usaha dan Industri:
    - Membangun kemitraan strategis dengan dunia usaha dan industri untuk menciptakan program magang, pelatihan kerja, dan penelitian terapan.

- Mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan SDM melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada pendidikan dan pelatihan.
- f. Peningkatan Akses terhadap Teknologi dan Informasi:
- Memperluas akses masyarakat terhadap teknologi dan informasi dengan menyediakan fasilitas internet yang memadai di seluruh wilayah Pasaman.
  - Mendorong penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan pelatihan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi.
7. Mewujudkan sektor pertanian dan perikanan yang handal.
- a. Peningkatan Produktivitas Pertanian:
- Menerapkan teknologi pertanian modern seperti menggunakan Alat – alat pertanian modern, penggunaan pupuk organik, dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas.
  - Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada petani untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam praktik pertanian yang baik.
- b. Pengembangan Infrastruktur Pertanian:
- Membangun dan memperbaiki infrastruktur pertanian seperti jalan tani, irigasi, dan gudang penyimpanan hasil panen untuk mendukung aktivitas pertanian.
  - Menyediakan akses yang lebih baik ke pasar bagi petani untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang adil.
- c. Diversifikasi Produk Pertanian:
- Mendorong diversifikasi produk pertanian dengan mengembangkan tanaman hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan lainnya yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
  - Mengembangkan produk olahan pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal.
- d. Pengembangan Sektor Perikanan:

- Meningkatkan produksi perikanan dengan menerapkan teknologi budidaya ikan yang ramah lingkungan dan efisien.
  - Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam praktik perikanan yang baik.
- e. Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi:
- Membangun kolam ikan yang modern dan menggunakan teknologi seperti recirculating aquaculture systems (RAS) untuk meningkatkan produksi tanpa memerlukan banyak air.
  - Penerapan teknologi pemantauan kualitas air otomatis untuk memastikan kondisi optimal bagi ikan.
- f. Pembenihan dan Pemuliaan Ikan:
- Menyediakan bibit ikan unggul dan berkualitas melalui program pemuliaan genetik. Hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan ketahanan ikan terhadap penyakit.
  - Mengembangkan hatchery yang memenuhi standar nasional dan internasional untuk produksi benih ikan air tawar seperti nila, lele, dan patin.
- g. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Air:
- Mengelola kualitas air dan lingkungan di sekitar kolam perikanan agar tetap bersih dan sehat. Pemeliharaan ini penting untuk menjaga produktivitas dan menghindari penyakit.
  - Melakukan rehabilitasi dan perlindungan daerah tangkapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air bagi kegiatan perikanan.
- h. Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan:
- Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam setiap kegiatan pertanian dan perikanan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
  - Melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor pertanian dan perikanan untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

- i. Sistem Pembiayaan dan Dukungan Pemerintah Daerah.
  - Menyediakan akses mudah ke pembiayaan atau kredit mikro bagi petani ikan melalui program pemerintah daerah atau kemitraan dengan bank dan lembaga keuangan lainnya.
  - Meningkatkan dukungan kebijakan dari pemerintah daerah, termasuk memfasilitasi ketersediaan pakan ikan atau peralatan, serta penyederhanaan regulasi untuk usaha perikanan.
  
8. Meningkatkan kesiapsiagaan dan tanggap bencana dilaksanakan dengan program aksi sebagai berikut :
  - a. Pengembangan Sistem Peringatan Dini:
    - Membangun dan mengoptimalkan sistem peringatan dini bencana (early warning system) yang dapat memberikan informasi cepat dan akurat kepada masyarakat.
    - Mengintegrasikan teknologi modern seperti aplikasi mobile dan sirine otomatis untuk menyebarkan peringatan dini secara luas dan cepat.
  - b. Pelatihan dan Simulasi Bencana:
    - Menyelenggarakan pelatihan dan simulasi bencana secara rutin bagi masyarakat, sekolah, dan instansi pemerintah untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan respons cepat.
    - Melibatkan berbagai pihak seperti TNI, Polri, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan simulasi untuk memastikan koordinasi yang baik saat terjadi bencana.
  - c. Peningkatan Kapasitas Tim Tanggap Darurat:
    - Membentuk dan memperkuat tim tanggap darurat di setiap kecamatan yang dilengkapi dengan peralatan dan pelatihan yang memadai.
    - Menyediakan fasilitas dan logistik yang diperlukan untuk mendukung operasi tanggap darurat, seperti kendaraan evakuasi, tenda darurat, dan peralatan medis.
  - d. Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas:

- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan risiko bencana melalui program Nagari Tangguh Bencana (Natana).
  - Mengadakan kegiatan edukasi dan penyuluhan tentang mitigasi bencana dan tindakan yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi.
- e. Peningkatan Infrastruktur Tahan Bencana:
- Membangun dan memperbaiki infrastruktur publik seperti jembatan, jalan, dan bangunan yang tahan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan banjir.
  - Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap proyek infrastruktur untuk mengurangi risiko kerusakan akibat bencana.
- f. Koordinasi dan Kolaborasi Antar Lembaga:
- Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan respons yang cepat dan efektif.
  - Membangun kemitraan dengan lembaga internasional untuk mendapatkan dukungan teknis dan finansial dalam upaya penanggulangan bencana.

## 2) TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM

Hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Maka berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, direncanakan tujuan, sasaran, dan program untuk setiap misi sebagai berikut:

- 1: Mewujudkan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa, berlandaskan “**ADAIK BASANDI SYARAK, SYARAK BASANDI KITABULLAH**”

Tujuan:

1. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
2. Menciptakan kenyamanan dan kualitas keagamaan
3. Mengoptimalkan pelestarian adat dan budaya

#### Sasaran:

1. Meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama
2. Menjamin ketersediaan Infrastruktur keagamaan
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia keagamaan
4. Meningkatnya peran lembaga/organisasi keagamaan
5. Meningkatnya kerukunan hidup beragama
6. Meningkatkan peran lembaga dalam pemberantasan penyakit masyarakat (Pekat)
7. Meningkatnya peran lembaga/organisasi adat
8. Pelestarian adat dan budaya daerah
9. Pemasyarakatan budaya gotong rong.

#### Program:

1. Program peningkatan keimanan dan ketaqwaan
2. Program Pengembangan Tahfiz Quran
3. Program Pengembangan Lembaga Pendidikan Keagamaan
4. Program penyelenggaraan kegiatan keagamaan
5. Program pengelolaan sarana prasarana keagamaan
6. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama
7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
8. Program pemahaman kehidupan beragama dan berbangsa
9. Program pengembangan wawasan Kebangsaan
10. Program Pengembangan peran dan fungsi organisasi keagamaan
11. Program Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

2: Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.

#### Tujuan:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Meningkatkan Pelayanan dan Pemerataan Pendidikan
3. Meningkatkan Mutu Pendidikan

4. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan kualitas tenaga kependidikan
5. Meningkatkan minat dan budaya baca
6. Transformasi dan pemasyarakatan teknologi informasi digital
7. Meningkatkan motivasi, kreatifitas, dan produktifitas generasi muda.

Sasaran:

1. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat
2. Meningkatnya layanan pendidikan
3. Meningkatnya pemerataan pendidikan
4. Meningkatnya mutu pendidikan
5. Meningkatnya karakter dan integritas peserta didik
6. Meningkatnya minat baca dan budaya membaca
7. Meningkatnya edukasi dan literasi digital
8. Meningkatnya motivasi, kreatifitas, dan produktifitas generasi muda.

Program:

1. Program pengelolaan pendidikan
2. Program pendidik dan tenaga kependidikan
3. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media masa
4. Program Peningkatan kemitraan antara Pemerintah dengan Lembaga/Stakeholder Pendidikan
5. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan Perpustakaan
6. Program Pengembangan Edukasi, dan literasi Teknologi Informasi
7. Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan

Misi 3: Peningkatan derajat Kesehatan

Tujuan:

1. Meningkatkan infrastruktur dan kualitas pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan
3. Meningkatkan budaya hidup sehat masyarakat
4. Mengoptimalkan jaminan kesehatan tepat sasaran

Sasaran:

1. Meningkatnya kenyamanan pelayanan kesehatan
2. Meningkatnya kebersihan lingkungan
3. Meningkatnya perilaku budaya hidup sehat
4. Meningkatnya peran semua pihak dalam meningkatkan kesehatan
5. Meningkatnya kualitas jaminan kesehatan masyarakat

Program:

1. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Kesehatan
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
4. Program lingkungan sehat perumahan
5. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
7. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular/Tidak Menular
10. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
11. Program Pengawasan Obat dan Makanan
12. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
13. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
14. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
15. Program Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak
16. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
17. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
18. Program perlindungan dan jaminan sosial

Misi 4: Penyediaan Infrastruktur yang berhasil guna

Tujuan:

1. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan infrastruktur dan pola pengembangan wilayah
2. Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur yang merata
3. Meningkatkan Pelayanan dan Akses Transportasi, Komunikasi dan Informasi

Sasaran:

1. Meningkatnya implementasi perencanaan pembangunan infrastruktur
2. Optimalnya pola pengembangan wilayah
3. Meningkatnya kesesuaian rencana pembangunan dengan tata ruang
4. Meningkatnya
5. Meningkatnya infrastruktur penunjang percepatan pembangunan perdesaan
6. Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas daerah
7. Meningkatnya akses kawasan perbatasan
8. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pengelolaan sumberdaya air dan irigasi
9. Meningkatnya Prasarana Umum pada kawasan pemukiman/ perumahan, bangunan dan lingkungan
10. Meningkatnya pelayanan komunikasi dan informasi berbasis pendidikan

Program:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program penyelenggaraan penataan ruang
3. Program pembangunan infrastruktur pedesaan
4. Program Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh
5. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
6. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
7. Program Peningkatan sarana dan prasarna kebinamargaan
8. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
9. Program Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi secara Partisipatif
10. Program Penguatan Kelembagaan pengelolaan irigasi
11. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

12. Program pembangunan sarana, prasarana, dan fasilitas perhubungan
13. Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
14. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
15. Program Pengembangan Sistem Informasi Daerah

Misi 5: Peningkatan daya saing daerah

Tujuan:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan konsistensi terhadap roadmap pola pembangunan berkelanjutan
2. Mengoptimalkan kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan penanaman modal
3. Meningkatkan Sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat
4. Mendorong pertumbuhan usaha potensial
5. Meningkatkan produksi hilir berbasis mikro kecil dan menengah
6. Mendorong peningkatan investasi dan peningkatan potensi lokal

Sasaran:

1. Terciptanya pola pembangunan secara menyeluruh
2. Meningkatnya investasi badan usaha
7. Meningkatnya Sinergitas antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat
3. Meningkatnya produksi hilir berbasis mikro kecil dan menengah
4. Meningkatnya potensi strategis berbasis kearifan lokal
5. Terciptanya lapangan kerja masyarakat
6. Meningkatnya investasi dan potensi lokal

Program:

1. Program perencanaan pembangunan daerah
8. Program penelitian dan pengembangan daerah
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
3. Program pengembangan iklim penanaman modal
4. Program kerjasama penanaman modal
5. Program Pengembangan Sentra Komoditi Unggulan

6. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
7. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
8. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
9. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

#### Misi 6: Optimalisasi tata kelola Pemerintahan

##### Tujuan:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
2. Mengoptimalkan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah berbasis Digitalisasi Teknologi
4. Meningkatkan transparansi pelaksanaan, pengelolaan dan pelayanan publik

##### Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
2. Meningkatnya kinerja dan integritas aparatur
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah
4. Meningkatnya konsistensi perencanaan dan penganggaran
5. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan
6. Meningkatnya kepercayaan publik

##### Program:

1. Program Optimalisasi Pelaksanaan Pemerintah Daerah
2. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perizinan
5. Program pengelolaan aplikasi informatika
6. Program Pengembangan Komunikasi/Informasi dan Media Masa
7. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

8. Program Pengelolaan informasi dan komunikasi public.

### 3) PENUTUP

Penjabaran Visi dan Misi diatas direncanakan untuk Kabupaten Pasaman periode 2025-2029. Visi dan Misi ini selanjutnya dijabarkan dalam bentuk Program Aksi, Tujuan, Sasaran, dan Program, dengan harapan Pasaman Yang Berkarakter, Maju, Dan Berkelanjutan Untuk Pasaman Bangkit 2025-2029 dapat terwujud, dengan kondisi masyarakat berbudaya, berkepribadian luhur, bermoral dan tentunya saling bekerjasama sehingga Kabupaten Pasaman semakin makmur dan sentosa dengan tingginya tingkat kesejahteraan masyarakat. Disisi lain perwujudan konsistensi pembangunan menjadi salah satu hal yang akan dioptimalkan sehingga aktifitas investasi berdaya guna dan berhasil guna, dan pada akhirnya pasaman bangkit akan dapat kita wujudkan secara bersama-sama.

Demikianlah penjelasan Visi dan Misi yang dapat kami sampaikan, terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terkait sehingga secara bersama-sama kita dapat mengoptimalkan pembangunan kedepannya.

Lubuk Sikaping,9 Maret 2025



**Welly Suhery,S.T.**  
Calon Bupati



**Parulian**  
Bakal Calon Wakil Bupati